

## AKUNTABILITAS BERBASIS SYARIAH ENTERPRISE THEORY DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI SUSTAINABLE

Sri Wahyuni<sup>1</sup>, Muhammad Wahyuddin Abdullah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN AlAuddin Makassar

E-mail: [unhywahyuni146@gmail.com](mailto:unhywahyuni146@gmail.com)<sup>1</sup>, [Wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id](mailto:Wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Tujuan artikel ini adalah untuk memahami akuntabilitas berbasis syariah *enterprise theory* dalam mewujudkan ekonomi sustainable. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), Penelitian kepustakaan merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai macam referensi yang menjadi sumber utama untuk melakukan penelitian, referensi yang merupakan sumber primer dalam penelitian ini adalah artikel yang dimuat dalam jurnal, dan artikel tertulis lainnya. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa. Akuntabilitas berdasarkan pada *Shariah Enterprise Theory* memberikan perspektif terhadap akuntabilitas menjadi tiga dimensi, yaitu akuntabilitas terhadap Tuhan, manusia dan alam. *Shariah enterprise theory* sudah mempertimbangkan kesadaran spiritual dalam diri manusia, sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan berlandaskan ibadah kepada Tuhan, maqashid syariah sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, syariah enterprise theory, kesejahteraan

### Pendahuluan

Dalam mempertahankan hidupnya, manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan dibatasi oleh kebebasan manusia lain, bila antara manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya, maka akan terjadi konflik. Bila terjadi hal ini, maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkannya, apalagi interaksi manusia itu berhubungan dengan perekonomian atau usaha bisnis.<sup>1</sup>

Perkembangan bisnis Islam (syariah) kini kian marak dan menjamur di Indonesia. Salah satu pendorongnya adalah karena adanya kesadaran masyarakat yang mayoritas Muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan produk-produk (barang maupun jasa) yang halal dan *ṭayyib*.<sup>2</sup>

Bisnis Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah, kepada manusia sebagai khalifah di bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi

<sup>1</sup>Rizal Darwis, 'Konsep Dan Dasar Keuangan Dalam Islam', *Tabki*, IX.2 (2013), 65–82 <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEWjmkdH5y9fvAhWUbisKHZxRAhoQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fjurnal.i>

[ainambon.ac.id%2Findex.php%2FTHK%2Farticle%2Fview%2F77&usg=AOvVaw15YQRwyghMpORL7mFw7rFR](https://ainambon.ac.id%2Findex.php%2FTHK%2Farticle%2Fview%2F77&usg=AOvVaw15YQRwyghMpORL7mFw7rFR)>.

<sup>2</sup>Choirul Huda, 'MODEL PENGELOLAAN BISNIS SYARIAH: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang', *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24.1 (2016), 165–90 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/ws.2016.24.1.1140>>.

diberikan petunjuknya melalui para Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah ahlak maupun syariah.<sup>3</sup> Tidak hanya serangkaian aktivitas untuk mencari laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendaayagunaannya dengan aturan halal dan haram.

Tanggung jawab atau akuntabilitas sebuah organisasi bisnis Islam dalam bentuk laporan hasil dan posisi keuangan didedikasikan kepada kontributor sumber daya keuangan dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Penerima tanggungjawab yang paling penting didalam organisasi bisnis Islam adalah Tuhan. Organisasi bisnis Islam menjalankan operasi, penentuan tujuan dan pencapaian tujuan didasarkan sepenuhnya pada nilai-nilai etika syariah. Dalam akuntansi berguna untuk membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien dengan memberikan informasi guna pengambilan keputusan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan investasi.<sup>4</sup>

Teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah Syariah Enterprise Theory, hal ini karena dalam syariah enterprise theory, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah

yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Syariah Enterprise Theory menyatakan kepedulian tidak hanya menyangkut kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), akan tetapi juga menyangkut kepentingan stakeholders yang lebih luas, meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi.<sup>5</sup> Dalam syariah enterprise theory, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan harus dapat memberikan syariah value added (kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan mental, dan kesejahteraan spiritual) bagi stakeholders.<sup>6</sup>

Kesejahteraan dan bahwa kualitas kehidupan berupa pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan sejatinya merupakan ukuran keberhasilan pembangunan sedangkan yang menjadi penentu utama tingkat kemiskinan adalah kapabilitas untuk berfungsi. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pembangunan ekonomi yang biasa diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan sosial masih harus diselaraskan dengan perhatian terhadap lingkungan. Kualitas lingkungan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh

<sup>3</sup>Mohamad Sholikhin, 'Prospek Perbankan Islam Dan Bisnis Syari'ah Dalam Pengembangan Ekonomi', *Iqtishadia*, 6.2 (2013), 241–58 <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwityvC4kdjvAhUPXSsKHx-DOoQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fjournal.iainkudus.ac.id%2Findex.php%2FIQTISHADIA%2Farticle%2Fdownload%2F1113%2F1042&usg=AOvVaw16SMmM7ImNlhaQ6>>.

<sup>4</sup>Rahmah Yulisa Kalbarini and Noven Suprayogi, 'Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)', *JESTT*, 1.7 (2014), 506–17.

<sup>5</sup>Poppy Ruddin, 'ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN SHARIAH ENTERPRISE THEORY', 04.02, 31–42.

<sup>6</sup>Ririn Irmadariyani, 'Implementasi Strategic Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory', *Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal*, 2.4 (2016), 842–51 <[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD5KzXw9\\_vAhXD7HMBHdCCHkQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unej.ac.id%2Findex.php%2Fprosiding%2Farticle%2Fview%2F3687&usg=AOvVaw1zOhozmzQJnPCxfPstspWz](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD5KzXw9_vAhXD7HMBHdCCHkQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unej.ac.id%2Findex.php%2Fprosiding%2Farticle%2Fview%2F3687&usg=AOvVaw1zOhozmzQJnPCxfPstspWz)>.

pembangunan ekonomi. Interaksi antara ekonomi dan sosial disebut sebagai equitable yang dapat diartikan dalam istilah keadilan, interaksi antara lingkungan dan sosial disebut sebagai livable atau dikenal juga sebagai konsep kualitas hidup yang dapat pula diartikan dalam istilah kenyamanan, interaksi antara ekonomi dan lingkungan disebut sebagai viable atau dalam artian usaha dalam meningkatkan kondisi ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat juga diartikan dalam istilah kelestarian; sedangkan interaksi antara ekonomi, sosial dan lingkungan disebut sebagai sustainable.<sup>7</sup>

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai macam referensi yang menjadi sumber utama untuk melakukan penelitian, referensi yang merupakan sumber primer dalam penelitian ini adalah artikel yang dimuat dalam jurnal, dan artikel tertulis lainnya.<sup>8</sup>

## Pembahasan

### A. Akuntabilitas dalam islam

Konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemegang kuasa penuh yang mengatur dunia. Manusia ditunjuk sebagai “khalifah” dalam bentuk amanah dan sebagai wakil Allah.<sup>9</sup> Sesuai

dengan dalam Surah Al-Baqarah:30. Yang artinya “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”

Manusia sebagai “khalifah” dan bagaimana konsep pertanggungjawaban ditekankan dengan perintah dari Allah melalui istilah “hisab” atau perhitungan/pengadilan (accountability) di hari pembalasan. Kepercayaan terhadap hari kiamat memiliki peranan yang penting dalam kehidupan seorang muslim yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konsep pertanggungjawaban sudah ditetapkan oleh sunnatullah yang sangat ditekankan dalam Islam, bukan merupakan norma etika yang umum atau perundang-undangan negara. Accountability tidak hanya terbatas dalam konteks spiritual, tetapi pertanggungjawaban diformulasikan kedalam sarana operasional untuk mencapai Ridha Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Secara terminologi accountability dari akar kata account, artinya laporan. Al-Qur'an mengartikan account sebagai hisab (perhitungan). Hisab dalam arti umum berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk account kepada Allah dalam segala hal yang berkaitan dengan usaha manusia. Segala

<sup>7</sup>Niken Pratiwi, Dwi Budi Santosa, and Khusnul Ashar, ‘Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur’, *JIEP*, 18.1 (2018), 1–13.

<sup>8</sup>Ahmad Riyansyah, pemikiran sofyan syafitri harahap tentang akuntansi syariah dan penerapannya, *At-tafahum : journal of Islamic law*, vol.1 No.2 (2017), h. 12-24.

<sup>9</sup>Shela Welly Arga, ‘AKUNTABILITAS KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada

KANINDOSyariahJatim)’, 1–20  
<<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0iZ2yvNfvAhWxkOYKHUpmDCwQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fjimfebub.ac.id%2Findex.php%2Fjimfeb%2Farticle%2Fview%2F1268&usg=AOvVaw36eRPqYkgH7LFrbM9eQWTH>>.

sumber daya yang tersedia untuk manusia ini merupakan bentuk sebuah kepercayaan, manusia menggunakan apa yang dipercayakan kepada mereka (manusia) didasarkan pada ketentuan-ketentuan syariat dan keberhasilan individu di akhirat bergantung pada kinerja manusia di dunia.<sup>10</sup>

Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak terlepas dari keadilan dan kebenaran. Konsep keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta atau yang lebih dikenal dengan sunnatullah. Pentingnya keadilan dalam kegiatan ekonomi dikarenakan dalam proses pengambilan keputusan, dibutuhkan informasi yang bermanfaat yaitu informasi yang didapat menggambarkan apa yang telah terjadi dan dalam batas aturan sosial dan perilaku ekonomi yang Islami.<sup>11</sup> Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban moral manajemen perusahaan terhadap anggota. Dengan demikian, maka manajer atau pengelola koperasi harus memiliki transparansi terhadap segala aktifitas keuangan dan investasi sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja. Manajer selaku agen memberikan informasi yang jelas terhadap perkembangan usaha, serta melaporkan temuan-temuan yang dapat membuat perusahaan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Akuntabilitas dalam perspektif Sharia Enterprise Theory memiliki keseimbangan nilai egoistik, altruistik, materi dan nilai spiritual. Dengan demikian, keseimbangan yang tercipta melibatkan beberapa pihak dan hubungan yang terjalin, sehingga membentuk tiga dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas terhadap Tuhan, manusia, dan alam.<sup>12</sup> Akuntabilitas

terhadap Tuhan diartikan sebagai upaya optimalisasi dari setiap sumber daya yang dianugerahkan kepada makhluknya merupakan suatu amanah yang didalamnya melekat tanggung jawab untuk menggunakannya sesuai dengan ketentuan syariat Allah, yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Akuntabilitas terhadap manusia diartikan sebagai hubungan antara manusia dimana satu pihak berperan sebagai pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non-keuangan, selanjutnya disebut direct stakeholder yakni pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik keuangan maupun non-keuangan, tetapi secara syariat mereka adalah pihak yang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (indirect stakeholder). Dan Akuntabilitas terhadap Alam. Alam diartikan sebagai ekosistem vital yang memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup perusahaan, dengan kata lain keseimbangan dalam menjaga kelestarian alam adalah poin utama dalam menciptakan harmoni kehidupan yang selaras dan seimbang. Perusahaan akan tetap eksis apabila memperhatikan lingkungan alamnya.

Sedangkan menurut Meutia Syariah Enterprise theory terdiri dari dua dimensi, yaitu:<sup>13</sup> Akuntabilitas Vertikal yaitu Allah, meliputi pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Allah. Beberapa contoh akuntabilitas vertikal, yaitu adanya opini Dewan Pengawas Syariah dan adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi berserta alasannya.

---

*Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2020), 77–88  
<<https://doi.org/10.37058/jes.v5i2.2073>>.

<sup>13</sup>Omi Pramiana and Nur Anisah, 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory', *EKSIS*, 13.2 (2018), 169–82  
<<http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/issue/view/0AHalaman>>.

---

<sup>10</sup>Kalbarini and Suprayogi.

<sup>11</sup>Kalbarini and Suprayogi.

<sup>12</sup>Yusuf Abdullah and Aa Willy Nugraha, 'Implementasi Akuntabilitas Berdasarkan Pada Perspektif Sharia Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mumtaz Tasikmalaya)',

Akuntabilitas Horizontal yaitu, Direct Stakeholders terhadap Nasabah contohnya adalah adanya pengungkapan kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah, laporan dana zakat dan qardhul hasan serta audit yang dilakukan terhadap laporan tersebut, informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan dengan skema profit dan loss sharing, dan penjelasan tentang kebijakan atau usaha untuk mengurangi transaksi non syariah dimasa mendatang. Akuntabilitas Horizontal, Direct Stakeholders terhadap Karyawan contohnya adalah adanya pengungkapan mengenai kebijakan upah dan renumerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan, dan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan pada karyawan dalam hal upah, training dan kesempatan karir. Akuntabilitas Horizontal Indirect Stakeholders adalah pertanggungjawaban kepada komunitas. Beberapa contoh akuntabilitas horizontal kepada komunitas adalah adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keunagan bank islam, kebijakan pembiayaan akan isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang agama, pendidikan dan kesehatan. Akuntabilitas Horizontal Alam contohnya adalah adanya pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, adanya jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan tersebut, dan usaha-usaha meningkatkan kesadaran kepada pegawai.

## B. Syariah Enterprise Theory

Konsep Enterprise Theory menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan, melainkan berada pada banyak tangan, yaitu stakeholder. Oleh karena itu enterprise theory direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Tetapi, dalam konsep syariah belum mengakui adanya partner tidak langsung yang memberikan kontribusi ekonomi karena partner tidak langsung ini mempunyai hak atas nilai tambah yang telah diperoleh perusahaan. Enterprise theory merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders. Dalam Shariah Enterprise Theory, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Enterprise theory mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan.<sup>14</sup>

Enterprise theory mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Konsep-konsep tersebut, adalah: Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Tuhan sebagai tujuan utama. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh stakeholders (direct, in-direct, dan alam) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh stakeholders. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (mandatory),

---

<sup>14</sup>Pramiana and Anisah.

dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para stakeholders. Dan Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif.

Dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada membangkitkan kesadaran ketuhanan, para penggunaanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syqriqh hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah. Stakeholder kedua dari Shariah enterprises theory adalah manusia, yang dibedakan antara direct-stakeholders dan indirect-stakeholders. Direct-stakeholders adalah pihak-pihak yang secaralangsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentukkontribusi keuangan (financial contribution) maupun nonkeuangan (nonfinancialcontribution). Karena mereka telah memberikan kontribusikepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali tidakmemberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuanganmaupun non-keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Golongan stakeholder terakhir dari Shariah enterprises theory adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena

didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan adalah berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.<sup>15</sup>

Syariah enterprise theory dilandasi oleh premis yang mengatakan bahwa manusia adalah khalifatullah fil ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam, mendorong untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap lingkungan manusia dan alam. Oleh karena itu, akan membawa kemaslahatan bagi stockholders, stakeholders, masyarakat dan lingkungan, tidak hanya mementingkan kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait. Selain itu memiliki karakter keseimbangan yang menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik serta nilai materi dengan nilai spiritual.<sup>16</sup> Dalam pandangan shariah enterprise theory, distribusi kekayaan (wealth) atau nilai tambah (value added) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisan yang memberikan kontribusi kepada, operasi perusahaan; seperti pemegang saham,

<sup>15</sup>Dori Novarela and Indah Mulia Sari, 'Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2.2 (2015), 145–60.

<sup>16</sup>Sri Ujiani Putri, 'Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory Untuk Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar', *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6.2 (2020), 187–203 <<https://doi.org/doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.242>>.

kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill. Artinya, cakupan akuntansi dalam sharia enterprise theory tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat reciprocal antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi enterprise theory yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan (wealth) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi atau keterampilan (skill).<sup>17</sup>

Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan Sharia Enterprise Theory tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya,. Oleh karena itu, Sharia Enterprise Theory memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders yang luas. Menurut Sharia Enterprise Theory, stakeholders meliputi tiga bagian:<sup>18</sup> Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada "membangkitkan kesadaran keTuhanan" para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Tuhan. Manusia, Stakeholder kedua dari syariah

enterprise theory adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu direct-stakeholders dan indirect- stakeholders. Direct-stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (financial contribution) maupun nonkeuangan (non-financial contribution). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Dan alam golongan stakeholder terakhir dari syariah enterprise theory adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi matihidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lainlainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lainlainnya.

Shariah enterprise theory tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, syariah enterprise theory menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (khalitullah fil

<sup>17</sup>Feri Irawan and Eva Muarifah, 'Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Persepektif Sharia Enterprise Theory', *Jurnal Ilmu Syariah*, 1.2 (2020), 1–30.

<sup>18</sup>Irawan and Muarifah.

ardh) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya.<sup>19</sup> Tentu saja konsep ini sangat berbeda dengan entity theory yang menempatkan manusia dalam hal ini stockholder sebagai pusat. Dalam konteks ini kesejahteraan hanya semata-mata dikonsentrasikan pada stockholders. Konsekuensi dari diterimanya syariah enterprise theory sebagai dasar dari pengembangan teori akuntansi syari'ah adalah pengakuan income dalam bentuk nilai-tambah (value-added), bukan income dalam pengertian laba (profit) sebagaimana yang diadopsi entity theory. Baydoun & Willett dalam islamic accounting theory dan islamic corporate reports-nya telah menunjukkan nilai tambah. Namun apa yang disampaikan oleh mereka sebetulnya masih dalam bentuk yang sederhana dan lebih menekankan pada bentuk penyajian dalam Laporan Nilai Tambah (value added statement).<sup>20</sup>

### C. Ekonomi Sustainable dalam islam

Islam merupakan agama yang sempurna, sebagai sebuah sistem hidup mencakup berbagai tuntunan yang universal. Selalu memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi manusia secara holistik berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di

dalam Al Qur'an maupun hadits. Ajaran Islam merupakan ajaran yang di dalamnya terkandung keseimbangan baik itu urusan dunia maupun akhirat. Islam tidak menitikberatkan kepada akhirat saja, karena di dalam konsep berislam akhirat dan dunia merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu apa yang diterima ketika di akhirat merupakan sebuah konsekuensi yang dilakukan ketika masa hidup.<sup>21</sup>

Secara lebih rinci, penulis mengelaborasi perspektif Islam dalam konteks pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensi yaitu worldview atau landasan berfikir, tujuan dan metode praktis.<sup>22</sup> World-view Islam dalam Ekonomi Berkelanjutan World-view Islam berdasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu Tauhid, Khalifah dan Adl. Tauhid merupakan hal yang paling penting dari konsep-konsep yang sudah disebutkan, karena hal ini merupakan implikasi bahwa alam semesta yang sudah dibentuk dan diciptakan adalah ciptaan Allah. Semua yang diciptakan-Nya memiliki tujuan masing-masing Sehingga memberikan makna dan signifikansi terhadap ekistensi alam semesta, yang manusia merupakan bagian di dalamnya. Selanjutnya, Khalifah yang merupakan tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menjadi makhluk pengganti di muka bumi, untuk memperbaiki apa yang telah dilakukan pada masa sebelumnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan: Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Dan (ingatlah) tatkala Rabbmu berkata kepada malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di

<sup>19</sup>Irmawati, *Optimalisasi Shari'ah Enterprise Theory Dalam Mencegah Praktik Riba Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)*, 2018  
<<https://www.google.com/url?sa=t&rcct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4rqPDzdfvAhWbbisKHcVsCjAQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Frepository.uin-alauddin.ac.id%2F11654%2F&usg=AOvVaw0eNfd5ZLHxr20ILppxpJEa>>.

<sup>20</sup>Irawan and Muarifah.

<sup>21</sup>Mar'atun Shalihah, 'Pengembangan Sistem Bisnis Berbasis Syariah Untuk Mendukung Strategi Pengembangan Yang Sustainable', *Tabkim*, x.2 (2014), 132–43.

<sup>22</sup>Sofi Mubarak and Muhammad Afrizal, 'ISLAM DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Studi Kasus Menjaga Lingkungan Dan Ekonomi Berkeadilan', *Dauliyah*, 3.1 (2018), 129–46.



bumi seorang khalifah'. Berkata mereka, 'Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau?'. Dia berkata, 'Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui' (QS. Al Baqarah : 30) Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa makna khalifah adalah sebagai pengganti untuk memelihara dan merawat bumi atau alam dan tidak untuk sebaliknya yaitu menciptakan kerusakan dan pertumpahan darah. Terakhir adalah Adl atau bersikap adil yang merupakan konsep fundamental yang harus dipenuhi ketika pengatur sebuah pemerintah serta mengelola lingkungan hidup. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa prinsip dasar pembangunan ekonomi dalam Islam, bahwa sumber daya alam yang diciptakan Allah merupakan modal atau perantara untuk mencapai kemakmuran atau yang disebutkan sebagai konsep Falah. Tanpa keadilan, adil terhadap manusia maupun alam, falah tidak akan pernah dapat dicapai.

Tujuan Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam Sebagaimana dijelaskan, bahwa falah atau kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Konsep Falah ini merupakan konsep yang menjelaskan kebahagiaan baik di dunia atau-pun di akhirat, yaitu dengan melaksanakan ajaran agama secara sempurna atau kaffah. Sehingga pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat tentunya yang selaras dengan ajaran agama Islam. Dalam mencapai kesejahteraan ataupun tujuan ini hal yang penting untuk diperhatikan adalah metode pencapaiannya yaitu maqashid syariah. Metode Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam Dalam ekonomi berkelanjutan, pemerintah perlu memperhatikan lima keperluan dasar manusia yang harus dipenuhi yaitu, Pemeliharaan terhadap keselamatan agama

(al-Din), Jiwa (al-Nafs), Akal (al-Aql), Keturunan (al-Nasl) dan Harta benda (al-Maal). Standar hidup manusia yang diberikan oleh Islam ini merupakan standar hidup yang sudah mengatur segala hal. Melalui pendekatan maqashid syari'ah inilah pembangunan ekonomi dilaksanakan. Oleh karena itu pembangunan merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kebaikan yang mendatangkan faedah atau manfaat, karena tanpa pembangunan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam kesejahteraan tidak mungkin dicapai. Apabila penerapan konsep ini berlaku dalam sistem pemerintahan maka akan terjalin mashlahat bukan hanya bagi Muslim tetapi juga masyarakat yang majemuk. Secara umum, banyak firman Allah yang menjelaskan bahwa semua sumber daya alam yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setidaknya ada dua dimensi dalam menggunakan sumber daya alam. *Pertama*, memobilisasi sumber daya alam yang bermaksud menghidupkan tanah mati dan memiliki sumber tersebut. Dalam kasus ini contohnya pemerintah dibolehkan mengambil alih (take over) tanah apabila bermanfaat untuk pembangunan ekonomi bagi tujuan pertambangan atau perumahan, pertanian, perdagangan, industri ataupun untuk fasilitas orang banyak. *Kedua*, pembangunan dan penggunaan sumber alam untuk manfaat manusia. Islam sangat menganjurkan untuk menghidupkan tanah mati dan memanfaatkan sumber alam yang menganggur untuk kemaslahatan manusia. Hal itu karena termasuk daripada tujuan dasar ekonomi Islam yaitu mencari kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan (mafsadah) dengan melalui penggunaan sumber secara optimal, keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu dan generasi, dan menghapus riba.

Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana

dengan keadaan dimasa datang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak mengeksploitasi lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan dimasa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar.<sup>23</sup>

#### D. Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable

Konsep akuntabilitas dalam Islam sangat erat hubungannya dengan hisab (perhitungan) di hari pembalasan. Hisab yang dimaksud dalam arti umum yaitu berkaitan dengan kewajiban seseorang sebagai account kepada Allah. Dalam segala hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Dalam konteks akuntabilitas, manusia seakan-akan mengikat kontrak dengan Allah. Kontrak tersebut, dari dan kepada Allah. sebagai The Ultimate Principal yang menugaskan manusia untuk menyebarkan rahmat atau kesejahteraan pada manusia lain dan alam. Konsekuensi dari sebuah penugasan adalah manusia harus bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk itu, akuntabilitas yang dilakukan oleh manajemen adalah akuntabilitas yang suci yaitu manajemen menyajikan “persembahan” yang suci kepada Allah, agar persembahan ini diterima dan mendapatkan ridha-Nya, manajemen kepada Allah.

Distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung atau partisipan yang memberikan kontribusi keuangan dan skill juga mendapatkan bagian dari distribusi kekayaan tersebut. Premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah khalifatullah fi al-ard yang membawa misi menciptakan dan

mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam ialah premis yang mendorong untuk senantiasa berusaha mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Keinginan untuk senantiasa membawa kemaslahatan bagi stockholders (pemegang saham), stakeholders, dan masyarakat serta lingkungan alam tanpa meninggalkan zakat, infak, dan sedekah sebagai manifestasi ibadah kepada Allah. Tidak dipungkiri bahwa salah satu tujuan dibukanya bisnis adalah untuk mendapatkan profit dalam bentuk uang atau materi. Dari penghasilan inilah yang kemudian diputar lagi untuk mendapatkan uang dan begitu seterusnya. Dari uang diputar sedemikian rupa dan dirubah menjadi uang lagi. Sederhananya, bisnis yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya mentransformasikan materi untuk menjadi materi yang lebih besar.<sup>24</sup>

Konsep pertanggungjawaban sudah ditetapkan oleh sunnatullah yang sangat ditekankan dalam Islam, bukan merupakan norma etika yang umum atau perundang-undangan negara. Accountability tidak hanya terbatas dalam konteks spiritual, tetapi pertanggungjawaban diformulasikan ke dalam sarana operasional untuk mencapai ridha Allah. Pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Pertanggungjawaban ini sebagai bentuk tugas mulia manusia sebagai khalifah yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta. akuntabilitas merupakan salah satu konsep terpenting dalam organisasi dan bisnis serta adanya trilogi hubungan akuntabilitas yaitu akuntabilitas ekonomi, ekologi, dan spiritual atau adanya dua dimensi hubungan akuntabilitas yaitu hubungan secara vertikal

<sup>23</sup>Kharis Raharjo, ‘Corporate Social Responsibility: Dari Etika Bisnis Menuju Implementasi Good Corporate Governance’, 1–25.

<sup>24</sup>Putri.

dan hubungan secara horizontal, yang menyatakan dengan adanya komunikasi dua arah, seperti laporan pertanggungjawaban antara pihak perusahaan dengan stakeholders akan membentuk perasaan saling memiliki, saling menjaga, terbentuk kesepahaman, kenyamanan dalam bekerjasama, serta akan tetap terjalin kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan tersebut.<sup>25</sup>

Penerapan akuntabilitas dalam konsep Syariah Enterprise Theory didasarkan pada konsep akuntabilitas pemilik perusahaan tentang akuntabilitas bahwa tujuan utama hidup di dunia rahmatan lil alamin yaitu setiap umat muslim diharuskan memberikan manfaat kepada sesama sebagai makhluk Allah. Perwujudan konsep tersebut dilakukan dengan pemisahan pertanggungjawaban dana bisnis dan dana sosial yang dikelola oleh pihak perusahaan. Pertanggungjawaban dana bisnis yang dikelola pihak perusahaan dipertanggungjawabkan kepada Allah melalui dana zakat dan laporan pertanggungjawabannya dibuat oleh pemilik sebagai bahan evaluasi peningkatan target zakat kedepan. Dana non bisnis yang dikelola dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti poster dan spanduk.<sup>26</sup>

Akuntabilitas merupakan pondasi utama dalam memelihara kepercayaan stakeholder, karena tanpa adanya akuntabilitas keberadaan suatu organisasi ataupun komunitas akan dapat terancam. Begitu pentingnya suatu organisasi dalam memelihara

akuntabilitasnya, untuk itu perlunya organisasi mengkaji dengan seksama bentuk-bentuk akuntabilitas yang dihasilkan untuk stakeholdernya. Bentuk-bentuk akuntabilitas dapat dikaji dalam berbagai dimensi hubungan akuntabilitas. Dalam Syariah Enterprise Theory dikenal trilogi dimensi hubungan akuntabilitas yang mengacu kepada Tuhan sebagai pusat dari akuntabilitas, akuntabilitas kedua adalah manusia kepada manusia yang mana masih dikategorikan dalam dua bentuk (direct dan indirect stakeholder) dan yang terakhir adalah alam, maka dari itu Syariah enterprises theory akan lebih sesuai untuk dijadikan alat analisis untuk memahami praktik akuntabilitas. Akuntabilitas meliputi berbagai macam aspek-aspek baik spiritual, yang berlaku hubungan manusia dengan Tuhan. Manifestasi akuntabilitas spiritual ini didasari bahwa segala aktivitas yang dilakukan adalah suatu bentuk ibadah, dan amal kepadanya. Jalan yang ditempuh untuk melakukan ke dua hal tersebut dengan berjihad di jalannya. Salah satu jalan jihad itu adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah (humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal) dalam aktivitas bisnis.<sup>27</sup>

Syariah enterprises theory merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasional juga bertujuan sebagai tindakan dasar dalam hubungan manusia dan alam, selain itu juga sebagai tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek yang terdapat tindakan dasar lainnya yang terkait dalam hubungan manusia dan penciptanya.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Mega Putri Mayang Puspitasari, 'Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Dalam Sudut Pandang Syariah Enterprise Theory Periode Tahun 2014 Studi Pada Bank Muamalat Dan Bank Bni Syariah', *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3.3 (2017), 646–61  
<<https://www.neliti.com/id/publications/25987/konsep-kepemilikan-dalam-islam-kajian-dari-aspek-filosofis-dan-potensi-pengembangan>>.

<sup>26</sup>Putri.

<sup>27</sup>Siti Amerieska, Gugus Irianto, and Didied P Affandy, 'AKUNTABILITAS PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF SHARI'ATE ENTERPRISE THEORY', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2.1 (2012), 27–39.

<sup>28</sup>Yulia Muchtamarini and Jalaluddin, 'Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory Pada Baitul Mal Kota

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidaklah sama dengan pembangunan ekonomi konvensional. Karena, Islam tidak menitikberatkan kepada aspek materi saja dalam upaya yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh masyarakat. Serta, aktivitas yang dilakukan di dalam roda ekonomi memiliki aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Yang terpenting adalah keadilan. Keadilan ini merupakan hal yang harus ada ketika aktivitas ekonomi dilakukan, pemaksimalan sumber daya alam sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan serta menghilangkan riba. Hal inilah yang bisa mencapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu tidak merusak lingkungan serta menciptakan keadilan serta kesejahteraan kepada seluruh masyarakat.<sup>29</sup>

## Kesimpulan

Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang dikelola kepada Allah. Akuntabilitas tidak hanya terbatas dalam konteks spiritual, tetapi juga merupakan pertanggungjawaban yang diformulasikan ke dalam sarana operasional untuk mencapai ridha Allah. Senantiasa memperhatikan etika bisnis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah. Syariah enterprise theory yang sudah mempertimbangkan kesadaran spiritual dalam diri manusia (ada keseimbangan antara materi dan spiritual). Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan berlandaskan ibadah kepada Tuhan, sehingga dapat memberikan kesejahteraan berupa syariah value added. Syariah value added meliputi nilai tambah ekonomi, mental dan spiritual yang harus dengan cara halal baik memperoleh, memproses, maupun mendistribusikannya. Islam telah memberikan

maqashid syariah sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Yusuf, and Aa Willy Nugraha, 'Implementasi Akuntabilitas Berdasarkan Pada Perspektif Sharia Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mumtaz Tasikmalaya)', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2020), 77–88 <<https://doi.org/10.37058/jes.v5i2.2073>>
- Amerieska, Siti, Gugus Irianto, and Didied P Affandy, 'AKUNTABILITAS PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF SHARI ' ATE ENTERPRISE THEORY', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2.1 (2012), 27–39
- Arga, Shela Welly, 'AKUNTABILITAS KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada KANINDO Syariah Jatim)', 1–20 <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0iZ2yvNfvAhWxkOYKHUpmDCwQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fjimfeb.ub.ac.id%2Findex.php%2Fjimfeb%2Farticle%2Fview%2F1268&usg=AOvVaw36eRPqYkgH7LFrBm9eQWTH>>
- Darwis, Rizal, 'Konsep Dan Dasar Keuangan Dalam Islam', *Tahki*, IX.2 (2013), 65–82 <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmkdH5y9fvAhWUbiSKHZxRAhoQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fjurnal.iainambon.ac.id%2Findex.php%2FTHK%2Farticle%2Fview%2F77&usg=AOvVaw15YQRwyghMp0RL7mFw7rFR>>
- Huda, Choirul, 'MODEL PENGELOLAAN BISNIS SYARI ' AH: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang', *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24.1 (2016), 165–90 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/ws.2016.24.1.1140>>
- Irawan, Feri, and Eva Muarifah, 'Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Persepektif

Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5.3 (2020), 328–36.

<sup>29</sup>Mubarok and Afrizal.

- Sharia Enterprise Theory', *Jurnal Ilmu Syariah*, 1.2 (2020), 1–30
- Irmadariyani, Ririn, 'Implementasi Strategic Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory', *Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal*, 2.4 (2016), 842–51  
<[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD5KzXw9\\_vAhXD7HMBHZdCCHkQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unej.ac.id%2Findex.php%2Fprosidings%2Farticle%2Fview%2F3687&usg=AOvVaw1zOhozmqJnPCXIPstspWz](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD5KzXw9_vAhXD7HMBHZdCCHkQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unej.ac.id%2Findex.php%2Fprosidings%2Farticle%2Fview%2F3687&usg=AOvVaw1zOhozmqJnPCXIPstspWz)>
- Irmawati, *Optimalisasi Shari'ah Enterprise Theory Dalam Mencegah Praktik Riba Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)*, 2018  
<<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4rqPDzdfvAhWbbisKHcVsCjAQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Frepositori.uin-alauddin.ac.id%2F11654%2F&usg=AOvVaw0eNfd5ZLHxr20ILppxpJEa>>
- Kalbarini, Rahmah Yulisa, and Noven Suprayogi, 'Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)', *JESTT*, 1.7 (2014), 506–17
- Mubarok, Sofi, and Muhammad Afrizal, 'ISLAM DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Studi Kasus Menjaga Lingkungan Dan Ekonomi Berkeadilan', *Dauliyah*, 3.1 (2018), 129–46
- Muchtamarini, Yulia, and Jalaluddin, 'Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5.3 (2020), 328–36
- Novarela, Dori, and Indah Mulia Sari, 'Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2.2 (2015), 145–60
- Pramiana, Omi, and Nur Anisah, 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory', *EKSIS*, 13.2 (2018), 169–82  
<<http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/issue/view%0AHalaman>>
- Pratiwi, Niken, Dwi Budi Santosa, and Khusnul Ashar, 'Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur', *JIEP*, 18.1 (2018), 1–13
- Puspitasari, Mega Putri Mayang, 'Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Dalam Sudut Pandang Syariah Enterprise Theory Periode Tahun 2014 Studi Pada Bank Muamalat Dan Bank Bni Syariah', *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3.3 (2017), 646–61  
<<https://www.neliti.com/id/publication/s/25987/konsep-kepemilikan-dalam-islam-kajian-dari-aspek-filosofis-dan-potensi-pengembangan>>
- Putri, Sri Ujjani, 'Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory Untuk Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar', *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6.2 (2020), 187–203  
<<https://doi.org/doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.242>>
- Raharjo, Kharis, 'Corporate Social Responsibility: Dari Etika Bisnis Menuju Implementasi Good Corporate Governance', 1–25
- Ruddin, Poppy, 'ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN SHARIAH ENTERPRISE THEORY', 04.02, 31–42
- Shalihah, Mar'atun, 'Pengembangan Sistem Bisnis Berbasis Syariah Untuk Mendukung Strategi Pengembangan Yang Sustainable', *Tahkim*, x.2 (2014), 132–43
- Sholikhin, Mohamad, 'Prospek Perbankan Islam Dan Bisnis Syari'ah Dalam Pengembangan Ekonomi', *Iqtishadia*, 6.2 (2013), 241–58  
<<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwityvC4kdjvAhUPXSsKHx->>

DOoQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fjournal.iainkudus.ac.id%2Findex.php%2FQITISHADIA%2Farticle%2Fdownload%2F1113%2F1042&usg=AOvVaw16SMmM7ImNlhaQ6>